LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam kerangka RKPD. Penyusunan LKjIP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Karimun, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Dr. HELMI, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720123 199703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karimun dan arah kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan bidang aplikasi dimana secara nasional diterangkan bahwa jasa komunikasi dan informasi memiliki pengertian sebagai integral dari sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun diuraikan bahwa penyelenggaraan sarana prasarana komunikasi dan informasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, dimana dengan sistem komunikasi dan informasi yang baik akan meningkatkan kelancaran berkomunikasi yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wilayah Kabupaten Karimun pada umumnya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mengemban 3 (Tiga) Urusan yaitu :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Statistik, dan;
3. Urusan Persandian.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang, sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mempunyai 5 (Lima) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok sehari – hari, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dibantu oleh 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 1 (Satu) Kepala Sub Bagian, 2 (Dua) Kepala Seksi dan 7 (Tujuh) Jabatan Fungsional Ahli Muda. Tetapi hingga per Agustus Jabatan Fungsional Ahli Muda menjadi 6 (enam) orang.

Kendala - kendala yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Sarana dan prasaran kantor belum dapat memenuhi tuntutan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Sumber daya manusia masih kurang (khususnya tenaga ahli dibidang IT).

Langkah – Langkah dan kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi/mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kinerja aparatur sesuai tupoksi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian sekilas pelaksanaan program dan kegiatan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

BAB I
PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah kepada masyarakat sebagai pemberi amanah untuk memberi pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku, pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspriasinya. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja.

Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggung jawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun;
2. Mendorong Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tersaji sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Komunikasi;

h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Teknologi Informasi;
i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Statistik dan Persandian;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas,pengkajian perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

   Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
   b. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
   c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
   d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi, tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
   e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;
   f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kerja;
   g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

h. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;
j. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik dan Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini dan Informasi Publik;
f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini publik dan Informasi Publik;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Komunikasi;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;
f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Statistik;
f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Persandian;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan Persandian; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Karimun;
4. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis android;
5. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
7. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
8. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
9. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang menguasai teknologi informasi.

1.4 JUMLAH PEGAWAI

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun terhitung per Desember 2023 didukung oleh pegawai sebanyak 21 Orang PNS, 1 Orang PPPK, 15 Orang Tenaga Honorer dan 16 Tenaga Insentif yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	Pembina Tk. I /IV.b	1
Sekretaris	Pembina Tk. I /IV.b	1
Kepala Bidang	Pembina/ IV.a	1
Kepala Bidang	Penata Tk. I /III.d	2
Kepala Bidang	Penata /III.c	1

Kepala Sub Bagian	Penata /III.c	1
Kepala Seksi	Penata Tk. I /III.d	1
Kepala Seksi	Penata /III.c	1
Pranata Humas Ahli Muda	Penata /III.c	4
Pranata Komputer Ahli Muda	Penata Tk. I /III.d	2
Staf PNS	Penata Muda Tk. I /III.b	3
Staf PNS	Penata Muda /III.a	1
Staf PNS	Pengatur Tk. I /II.d	2
Staf PPPK	IX/ IX	1
Staf Kontrak	-	15
Staf Insentif	-	16
TOTAL		**53**

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
S3	1
S2	4
S1	31
D3	2
SLTA/Sederajat	14
SMP	-
SD	1
TOTAL	**53**

Tabel 1.3 Jumlah Ideal Pegawai dibandingkan dengan Beban Kerja

No	Kelompok	Jumlah Pegawai (Orang)	
		Tersedia	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretariat	12	23
3	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	21	23
4	Bidang Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik	6	13
5	Bidang Teknologi Informasi	7	11
6	Bidang Statistik dan Persandian	6	15
TOTAL		**53**	**86**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja walau sudah menyertakan jumlah tenaga bantuan dan tenaga teknis yang ada.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Jenis Barang	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Lemari Arsip	5	20
2	Alat Penghancur Kertas	1	5
3	Conference Cam (Vicon Logitech)	1	2
4	Videotron P5	1	2
5	Sofa	1	2
6	AC	3	10
7	Televisi	1	2
8	Sound System (Data Center)	1	1
9	Microphone Condeser	1	1
10	Camera Video	1	3
11	Handy Cam	1	3
12	Meja Kerja	12	60
13	Kursi Kerja	14	60
14	Wireless Microphone	1	2
15	Wireless Video Transmission	1	2
16	Video Mixer	1	2
17	Tripod Camera	1	3
18	Lighting Stand Tripod	1	3
19	Lensa Kamera	1	3
20	Acces Door Data Center	1	1
21	Laptop	10	18
22	Monitor	1	1
23	Exteral Hardisk	1	5
24	UPS Data Center	1	3
25	Router Mikrotik	2	4
26	Kursi Besi/ Biasa	28	60
27	Kipas Angin	8	15
28	Background Studio	1	2
29	Bracket Stand Studio Photo	1	2
30	Antene Stand	1	1
31	Fingerprint	2	2
32	Printer	6	20
33	Komputer/ PC	-	22
34	Kendaraan Roda 4	-	1
35	CCTV	-	2
36	LCD Projector	1	2

Keterangan :

Secara umum jumlah barang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sudah ideal dengan kebutuhan barang

untuk menunjang beban kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, akan tetapi perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat komputer untuk spesifikasi yang lebih tinggi untuk menunjang kegiatan. Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menjadi penunjang utama untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun yang berhubungan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

1.6 KEUANGAN

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp10.628.471.206,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi sebesar 10.326.273.745,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp302.197.461,00 (Tiga Ratus Dua Juta Sepatus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**143.190.389,00**
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.317.268,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.525.534,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.347.587,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**3.348.367.970,00**
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.263.503.970,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.864.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**10.000.000,00**
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**156.521.449,00**
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.655.973,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.446.275,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.574.780,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.844.421,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**166.582.768,00**
Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	43.312.200,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.270.568,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**584.110.056,00**
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.350.056,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.160.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537.600.000,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**4.517.559.477,00**
Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	35.369.979,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.000.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	886.893.572,00
	Pelayanan Informasi Publik	74.413.106,00
	Layanan Hubungan Media	3.510.882.820,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**1.461.740.365,00**
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.266.346.209,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	195.394.156,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		**143.399.072,00**
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**143.399.072,00**
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	**143.399.072,00**
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		**96.999.660,00**
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**96.999.660,00**
Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.999.660,00

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan Rencana Strategis.

Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun periode 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Upaya mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Karimun menetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 yang merupakan keterkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik).

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun selama 5 tahun anggaran adalah : ***"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".***

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Sasaran	Indikator	Tahunan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menetapkan strategi dan arah kebijakannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	- Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta smart people dalam rangka pengembangan Smart City	- Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang Smart City - Pengembangan smart economy dan smart living dalam menunjang pengembangan Smart City

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		- Mendorong pemanfaatan e-commerce menuju smart economy dalam rangka pengembangan Smart City. - Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi E-government dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi E-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. - Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan smart tranportasi dalam rangka menuju Smart City.	- Pengembangan smart people dalam menunang pengembangan Smart City - Optimalisasi pengembangan kota menuju Smart City - Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi E-government - Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi E-Government

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	1,58
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30

2.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun maka ditetapkan 5 (lima) program OPD, 3 (tiga) program yang menjadi program prioritas dan 2 (dua) program pendukung, yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 (satu) kegiatan :
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 1 (satu) kegiatan :
   - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral, didukung 1 (satu) kegiatan :
   - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 1 (satu) kegiatan :
   - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, didukung 5 (lima) kegiatan :
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA SKPD

Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023, maka pada bab ini menguraikan target dan realisasi kinerja tahun ini, berbanding antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, análisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, análisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, dan serta análisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	1.58	2.01	127%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	0	0

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari sasaran program meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 2.01. Nilai ini makin meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun baru mulai berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya dengan segala upaya -upaya yang dilakukan demi mencapainya target yang diinginkan dan melaksanakan implementasi SPBE secara optimal, meskipun masih banyak kekurangan dalam penilaian indeks SPBE tersebut. Sedangkan nilai AKIP OPD belum terealisasi karena belum adanya penilaian kinerja untuk Tahun 2023. Berikut disajikan Hasil Evaluasi SPBE 2023 yang disajikan melalui Tabel 3.3

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi SPBE 2023

Nama Form	:	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi SPBE 2023
Pemerintah Kab. Karimun		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	**2,01**
Predikat SPBE	:	**Cukup**
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	2,50
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	2,50
Domain Tata Kelola SPBE	:	1,20
Perencanaan Strategis SPBE	:	1,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	1,50
Penyelenggara SPBE	:	1,00
Domain Manajemen SPBE	:	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	:	1,00
Audit TIK	:	1,00

Domain Layanan SPBE		:	2,67
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		:	3,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik		:	2,17
Rekap Tingkat Kematangan			
No.	Indikator		Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data		2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE		2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data		3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi		2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK		3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE		1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE		1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE		1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE		1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data		1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK		1

25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1

2.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun memiliki total anggaran sebesar Rp. 10.628.471.206,00 Dimana rincian dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Urusan/Program	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	**Rp**	**10.388.072.474,00**	**7.177.180.538,00**	**69,09**
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	4.517.559.477,00	3.106.589.537,00	68,77
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	1.461.740.365,00	99.913.475,00	6,84
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.408.772.632,00	3.970.677.526,00	90,06
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	**Rp**	**143.399.072,00**	**26.920.200,00**	**18,77**
1. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Rp	143.399.072,00	26.920.200,00	18.77
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	**Rp**	**96.999.960,00**	**66.120.594,00**	**68,17**
1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	96.999.960,00	66.120.594,00	68,17
TOTAL	**Rp**	**10.628.471.506,00**	**7.270.221.332,00**	**68,40**

2.3 EVALUASI KINERJA

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran “Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” berdasarkan indikator sasaran hanya terdapat 1 (satu) indikator yang terealisasi dengan capaian persentase kinerjanya 127 %. Jadi secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah mencapai target yang diinginkan sehingga mendapat kriteria penilaian realisasi kinerja SANGAT BAIK. Indikator sasaran Indeks SPBE dapat tercapai sesuai target yang ditentukan, Pada awalnya di dokumen Renstra target indikator Indeks SPBE Tahun 2023 adalah 2,7, setelah satu tahun berjalannya Diskominfo maka dapat diidentifikasi kendala-kendala yang ada, sehingga target indikator mengalami penurunan menjadi 1.58 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023. Meskipun terealisasi 127% tetapi masih terdapat kekurangan dalam indikator Indeks SPBE secara keseluruhan. Karena secara keseluruhan predikat dalam penerapan SPBE

masih menggambarkan predikat CUKUP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Kabupaten Karimun, menyatakan bahwa Kabupaten Karimun masih terdapat beberapa kelamahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, aspek Penyelenggraan SPBE, aspek Penerapan Manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Dimana pada aspek-aspek tersebut semua indikator mendapatkan Tingkat Kematangan 1. Meskipun demikian sebenarnya Kabupaten Karimun sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 yang menjadi landasan dari kegiatan pada indikator masing-masing aspek tersebut. Hanya saja peraturan ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk kegiatan yang mendukung Tingkat Kematangan Indikator pada aspek-aspek tersebut. Faktor – faktor yang menjadi penghambat keberhasilan tersebut yaitu :

1. Leader’s Awareness yang kurang;
2. Support Anggaran Minim;
3. Regulasi dan Implementasi tidak optimal;
4. Dokumentasi yang masih minim;
5. Narasi dan kehadiran pimpinan tidak terkoordinir;
6. Konsultan SPBE jika diperlukan;
7. SDM di Bidang TIK masih kurang;

Dari kelima program yang memuat lima indikator program, dinyatakan BERHASIL dengan memiliki capaian sebesar hampir 100%.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator program Indek Kepuasan Masyarakat yang seluruhnya hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	80%	79,88%	99,85%

Penjelasan tabel 3.5 sebagai berikut :

"Indek Kepuasan Masyarakat"

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun melalui Bidang Sekretariat melaksanakan :

1. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan APBD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 tahun anggaran.
2. Menyusun dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Melakukan pelaporan Akuntabiltas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, sekaligus melaporkan juga kepada Kementerian terkait (Kemendagri, KemenPAN-RB, dll) baik secara manual ataupun aplikasi.
4. Melakukan kegiatan yang bersifat peningkatan kelembagaan seperti Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai indikator program : Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program	Indikator	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	58%	80%	137,93%

Penjelasan tabel 3.6 sebagai berikut :

“Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Kehumasan bersama Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian. Adapun kinerja yang terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Kabupaten Karimun telah mendapatkan peringkat Cukup Informatif Tingkat Provinsi Kepri pada tahun 2023.
2. Terkelolanya informasi publik melalui website PPID.
3. Target jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik di tahun 2023 sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen.
4. Laporan Tahunan PPID 1 Dokumen
5. Dilaksanakannya monitoring opini dan aspirasi publik dengan jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen. Dan persentase publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dengan Meningkatkan Pengelolaan Opini Publik dengan dilakukan Diseminasi Informasi dan Literasi melalui kegiatan Bimtek pemanfaatan media sosial dalam memantau kebijakan Daerah dan tersedianya Rekomendasi Kebijakan terkait isu/ informasi yang berkembang dimasyarakat sebanyak 12 Rekomendasi.

6. Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui Aplikasi SP4N LAPOR sebanyak 10 Aduan
7. Laporan analisis Isu Publik bulanan sebanyak 10 laporan pada tahun 2023
8. Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi melalui website https:// diskominfostaper.karimunkab.go.id sebanyak 186 konten pada tahun 2023.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

1. Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengimplentasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perlu peningkatan sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi publik.
2. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan melalui PPID sebanyak 67 yang terdiri dari OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa namun hanya 11 OPD yang menyerahkan ke Pelayanan Informasi Publik, hal tersebut disebabkan karena belum banyaknya OPD yang belum memahami tentang keterbukaan informasi publik, maka dari itu perlu adanya sosialisasi untuk kedepannya dalam menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
3. Kurangnya respon Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada PPID Utama.
4. Sulitnya koordinasi dalam hal pengumpulan Data Daftar Informasi Publik (DIP).
5. PPID Karimun dalam rangka penyelesaian sengketa persoalan tanah telah berhasil melakukan perdamaian antara termohon dan pemohon melalui mediasi dan berakhir secara damai sesuai persetujuan kedua belah pihak.
6. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan internet dimana masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dalam menangkal informasi hoax. Penyebaran berita melalui media sosial sangat mudah dan viral, terjadi tanpa memastikan kebenarannya.
7. Kendala dalam Monitoring &Aspirasi Publik dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penggunaan input tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3) Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika mempunyai indikator program : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi.

Capaian kinerja Program Aplikasi Informatika tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Aplikasi Informatika

Program	Indikator	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	27%	27%	100%

Penjelasan tabel 3.7 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan E-government dalam melaksanakan Program Aplikasi Informatika telah melaksanakan berbagai kinerja berikut:

1. Pengelolaan layanan publik di Karimun meliputi aplikasi dan website;
2. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi umum sebagai berikut SIPD, SP4N LAPOR, SI CANTIK, OSS dan aplikasi khusus adalah SIKDA INTERGRATED, SIMDA KEUANGAN, SISTEM INFORMASI DATABASE INFRASTRUKTUR, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAPERLITBANG (SIMAMBANG), SIMTARU, SIDATIN SEHAT, PAJAK DAERAH, E-BPHTB, SIM-PBB, SIMDA PENDAPATAN, SI IKAN PARI, SIM RS KANZA, SIMKAR, TATANG, SI LANTIK, SIMARDI, ARAHKAN, namun aplikasi belum terintegrasi;
3. Beberapa website OPD sudah terintergrasi dengan website karimun.go.id. Website PPID sudah terintergrasi dengan website PPID Kemendagri.

KENDALA YANG ADA :

1. Kekurangan SDM dibidang IT, guna mendukung Transfomasi Digital.
2. Keterbatasan anggaran untuk mendukung layanan dan operasional data center, sehingga layanan publik di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya terintergrasi.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mempunyai indikator program Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program	Indikator	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	40%	70%	100%

Penjelasan tabel 3.8 sebagai berikut :

Capaian program penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk di Tahun 2023 Target di Perjanjian Kinerja Bidang Statistik dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menurun dari 70% menjadi 40%. Untuk Kegiatan Sub Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolah, pemeriksaan dan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral melalui permintaan data – data statistik sektoral yang di tujukan ke pada Badan/Dinas/OPD sebagai Produsen Data, untuk kegiatan tahun 2023 Statistik telah meminta 17 OPD dalam memberikan data statistik sektoral dan dari 17 OPD tersebut yang sudah memberikan data dengan sampai saat ini ada 15 OPD.

17 Badan/Dinas/OPD tersebut yaitu :

1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA :
   a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan JenisKelamin di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023;
   b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun Tahun 2022 dan 2023;

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023;
d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun,2023.

2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH :
   a. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Pendapatan (Rupiah), 2023;
   b. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun Menurut Jenis Belanja (Rupiah), 2023.
3. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :
   a. Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos;
   b. Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
   c. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
   d. Jumlah kasus Stunting per kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023.
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :
   a. Jumlah Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
   b. (KTP-el) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2023;
   c. Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023;
   d. Jumlah Akta Perkawinan yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023;
   e. Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Karimun, 2023;
   f. Jumlah Kelahiran dan Kematian serta Penduduk Datang dan Pindah yang Dilaporkan Menurut Desa/ Kelurahan di Kabupaten Karimun, 2023.

5. DINAS KESEHATAN :
   a. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
   b. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;

c. Jumlah Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) Menurut Kecamatan dan Penolong Proses Kelahiran di Kabupaten Karimun, 2023;
d. Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan dan Jenis Imunisasi di Kabupaten Karimun, 2023;
e. Jumlah Kunjungan Neonatal menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
f. Jumlah Anak Balita (12-59 bulan) yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Minimal 8 Kali Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
g. Jumlah Bayi Lahir Hidup, Bayi Lahir Mati, dan Bayi Meninggal Setelah Lahir menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
h. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BLBR), BLBR Dirujuk, dan Bergizi Buruk menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
i. Jumlah Ibu Hamil, Ibu yang Melahirkan, dan Ibu yang Belum Melahirkan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
j. Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Karimun, 2021-2023;
k. Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
l. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan, 2023;
m. Jumlah Penderita dan Kematian oleh Penyakit Muntaber/Diare dan DBD menurut Puskesmas di Kabupaten Karimun, 2023;
n. Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Karimun, 2023.

6. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :
   a. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
   d. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. DINAS PERHUBUNGAN :

   Jumlah Fasilitas Transportasi Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023.

8. DINAS PERIKANAN :
   a. Volume Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton), 2023;
   b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Rupiah), 2023;
   c. Volume Produksi Perikanan Budidaya per Triwulan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Rupiah), 2023;
   d. Nilai Produksi Perikanan Budidaya per Triwulan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Rupiah);
   e. Jumlah Armada Penangkap Ikan menurut Kecamatan dan Jenis di Kabupaten Karimun (Unit), 2023.
9. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN :
   a. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun, 2023;
   b. Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun (ton), 2023;
   c. Jumlah Petani Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun, 2023;
   d. Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Karimun, 2023;
   e. Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (kg), 2023;
   f. Produksi Tanaman Pangan menurut Jenisnya di Kabupaten Karimun (Ton), 2022 dan 2023.
10. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :
    a. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Karimun (meter), 2023;
    b. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Karimun (meter), 2023;

c. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi di Kabupaten Karimun (m), (meter), 2023.

11. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN :
    a. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2023;
    b. Jumlah Pencari Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin per Bulan di Kabupaten Karimun, 2023;
    c. Jumlah Tenaga Kerja Asing Terdaftar Menurut Kebangsaan di Kabupaten Karimun, 2023;
    d. Jumlah Kecelakaan Pekerja Menurut Jenis Kecelakaan dan Bulan di Kabupaten Karimun, 2023.
12. DINAS PARIWISATA :
    a. Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
    b. Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten;
    c. Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023.
13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :
    a. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Yang Investasi pada Kawasan Non-FTZ menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023;
    b. Nilai Investasi Perusahaan PMA dan PMDN pada Wilayah Non-FTZ Menurut Kecamatan di KabupatenKarimun (Rupiah), 2023.
14. SEKRETARIAT DAERAH (*BAGIAN HUKUM dan BAGIAN PEMERINTAHAN*) :
    a. Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Hukum)*;
    b. Peraturan Bupati yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Hukum)*;
    c. Jumlah Keputusan Bupati Karimun Menurut Jenis Keputusan, 2023 *(Bagian Hukum)*;
    d. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Pemerintahan)*;
    e. Jumlah Lingkungan/Dusun, RK/RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Pemerintahan)*;

f. Jumlah Lingkungan/Dusun, RK/RW, dan RT Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Pemerintahan)*;

g. Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Karimun, 2023 *(Bagian Pemerintahan)*.

15. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL :
    a. Jumlah Koperasi dan Anggota di Kabupaten Karimun, 2022 dan 2023;
    b. Modal, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Karimun (Rupiah), 2023.
16. SEKRETARIAT DPRD
    a. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2023;
    b. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2023;
    c. Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun, 2023.
17. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERASANDIAN :
    a. Jumlah Website/Aplikasi Menurut Dinas/Instansi Pemerintah di Kabupaten Karimun, 2023;
    b. Jumlah Saluran Komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) Milik Pemda Menurut Dinas/Instansi Pemerintah di Kabupaten Karimun, 2023;
    c. Jumlah BTS (Base Transceiver Station) per Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2023.

KENDALA YANG ADA :

1. Keterbatasan Anggaran untuk menjalankan kegiatan statistik sektoral
2. Kekurangan SDM
3. Kekurangan Fasilitas untuk menunjang pekerjaan
4. Kurangnya kesadaran dari OPD dalam kerjasama memberikan data – data yang diminta

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mempunyai indikator program tingkat keamanan informasi pemerintah. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun 2023 dan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program	Indikator	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20%	21%	105%

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun melalui Bidang melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian pada tahun 2023 melaksanakan urusan Persandian dengan menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Urusan Persandian oleh Tim Satuan Tugas Keamanan Informasi dan Siber Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah melaksanakan kegiatan patroli keamanan siber dengan menelusuri website yang dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, yaitu :

NO	NAMA SUB DOMAIN	OPD PENGELOLA
1	karimunkab.go.id	Diskominfostaper
2	diskominfostaper.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
3	silantik.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
4	ppid.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
5	opendata.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
6	apa.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
7	pem.karimunkab.go.id	Diskominfostaper
8	bapenda-online.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
9	bapenda.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
10	cloud.bapenda.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
11	dashboard.bapenda.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah

12	dispenda.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
13	pajak-bapenda.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
14	ebphtb.karimunkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
15	disnaker.karimunkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
16	disnakerprind.karimunkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
17	disperindag.karimunkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
18	dpupr.karimunkab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	simtaru.dpupr.karimunkab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	pu.karimunkab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	bpkad.karimunkab.go.id	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
22	cloud.bpkad.karimunkab.go.id	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
23	bkpsdm.karimunkab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
24	sikda.karimunkab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
25	edisiplin.karimunkab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
26	bpmpt.karimunkab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
27	dpmptsp.karimunkab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
28	lpse.karimunkab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
29	lpsetbk.karimunkab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
30	ukpbj.karimunkab.go.id	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
31	baperlitbang.karimunkab.go.id	Baperlibang
32	cloud.rsud.karimun.karimunkab.go.id	Rumah Sakit Umum Daerah M.Sani
33	covid19.karimunkab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	disdagkopukmesdm.karimunkab.go.id	Dinas Koperasi UMP dan ESDM
35	diskan.karimunkab.go.id	Dinas Perikanan
36	dispar.karimunkab.go.id	Dinas Pariwisata
37	disperpusip.karimunkab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38	dispora.karimunkab.go.id	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
39	dlh.karimunkab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup

40	satpolpp.karimunkab.go.id	Badan SATPOL PP
41	mtq.karimunkab.go.id	LPTQ Kabupaten Karimun
42	mail-dukcapil.karimunkab.go.id	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
43	perpusda.karimunkab.go.id	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
44	jdih.karimunkab.go.id	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
45	disdik.karimunkab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	datadik.karimunkab.go.id	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	dinkes.karimunkab.go.id	Dinas Kesehatan
48	mediacenter.karimunkab.go.id	Medic Center
49	perbatasan.karimunkab.go.id	Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama
50	setda.karimunkab.go.id	Sekretariat Daerah Kantor Bupati Karimun

Adapun tugas dari Satgas Keamanan Informasi dan Siber adalah :

a. Melaksanakan kegiatan perencanaan pada layanan pemerintah dalam pengamanan siber seperti laporan kejahatan siber, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengamanan Informasi Siber;
b. Melaksanakan proses patroli siber yang dilaksanakan *Satgas Keamanan Informasi dan Siber;*
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan siber;
d. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber berkoordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara; dan
e. Melaporkan hasil penanggulangan Insiden Siber kepada Kepala Daerah dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Untuk Tahun 2023 Indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dapat terealisasi dengan baik melalui Tim Satgas Keamanan Informasi dan Siber, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, tetapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berusaha untuk tetap mencapai target yang diinginkan.

BAB IV
PENUTUP

Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun pada tahun 2023 melalui 5 (lima) program terdapat 4 (empat) program capaian kinerja yang 100% ke atas dimana kategorinya adalah sangat baik, kemudian 1 (satu) program capaian kinerjanya 99.85%.

Hal ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dalam mendukung pencapaian kinerja daerah. Prestasi ini bukan merupakan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun secara mandiri, namun tentunya terdapat kontribusi seluruh perangkat daerah sebagai sebuah satu kesatuan dalam pemerintah Kabupaten Karimun.

Dengan laporan kinerja terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan informasi untuk menemukan strategi mempertahankan capaian kinerja yang sudah sangat baik serta membuat inovasi dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip good governance.

Karimun, Januari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

Dr. HELMI, SE., M.Si.
NIP. 1972 0123 199703 1 006